



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH
RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI V DPR RI
DENGAN SEKRETARIS JENDERAL, INSPEKTUR JENDERAL, KEPALA BADAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN, DAN KEPALA
BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA**

- Tahun Sidang : 2023-2024
Masa Persidangan : I
Rapat Ke- : Ke-7
Jenis Rapat : RDP
Sifat Rapat : Terbuka
Hari, Tanggal : Kamis, 31 Agustus 2023
Waktu : Pukul 14.30 WIB s.d. 16.10 WIB
Tempat : Ruang Rapat Komisi V DPR RI, (Ruang KK V) Gedung Nusantara DPR RI
- Ketua Rapat : Lasarus, S.Sos., M.Si (F-PDIP) – Ketua Komisi V DPR RI
Acara : Membahas alokasi anggaran menurut fungsi dan program masing-masing unit Eselon I K/L mitra kerja Komisi V DPR RI Dalam RAPBN TA. 2024
- Sekretaris Rapat : Nunik Prihatin Budiastuti, S.H., Kabag Komisi V DPR RI
Hadir : A. Anggota DPR RI:
33 dari 55 orang Anggota dengan rincian:
1. FRAKSI PDI-PERJUANGAN (F-PDIP)
6 dari 12 orang Anggota
 1. Lasarus, S.Sos., M.Si.
 2. Bob Andika Mamana Sitepu, S.H.
 3. Ir. Sudjadi
 4. Sri Rahayu
 5. Harvey B. Malaihollo
 6. Irine Yusiana Roba Putri, S.Sos., MCOMN&MEDIAS
 2. FRAKSI PARTAI GOLKAR (F-PG)
6 dari 8 orang Anggota
 1. Drs. Hamka B Kady, M.S.
 2. Cen Sui Lan
 3. DR. H. Ali Mufthi, S.AG., M.Si.
 4. H. Tubagus Haerul Jaman, S.E.
 5. Ilham Pangestu
 6. Muhammad Fauzi, S.E.

3. FRAKSI PARTAI GERINDRA
(F-GERINDRA)
3 dari 7 orang Anggota
 1. Ir. Sumail Abdullah
 2. Iis Rosyita Dewi, S.Hum., M.M.
 3. Drs. H. Mulyadi, M.MA.

4. FRAKSI PARTAI NASDEM (F-NASDEM)
4 dari 6 orang Anggota
 1. Roberth Rouw
 2. Drs. H. Tamanuri, M.M.
 3. H. Syarif Abdullah Alkadrie, S.H., M.H.
 4. Drs. Fadholi, M. Ikom.

5. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (F-PKB)
5 dari 6 orang Anggota
 1. H. Ruslan M. Daud, S.E., M.A.P.
 2. H. Irmawan, S.Sos., M.M.
 3. H. Dedi Wahidi, S.Pd.
 4. H. An'im Falachudin Mahrus
 5. Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz, M.M.

6. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT (F-PD)
2 dari 5 orang Anggota
 1. Willem Wandik
 2. Drs. H. Anwar Hafid, M.Si.

7. FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (F-PKS)
2 dari 5 orang Anggota
 1. H. Suryadi Jaya Purnama, S.T.
 2. Ir. H. Sigit Sosiantomo

8. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL (F-PAN)
3 dari 4 orang Anggota
 1. Hj. Hanna Gayatri, S.H.
 2. Athari Ghauthi Ardi
 3. Mesakh Mirin, SKM.

9. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
(F-PPP)
2 dari 2 orang Anggota
 1. H. Muhammad Iqbal, S.E., M.Com.
 2. Dr. H. Muh Aras, S.Pd., M.M.

UNDANGAN:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan RI
(Ir. Novie Riyanto, MSEA),
2. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan RI
(Ir. Arif Toha Tjahjagama, DEA),

3. Kepala BPSDM-P Kementerian Perhubungan RI (Dr. Ir. Djoko Sasono, M.Sc.),
4. Kepala Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan RI (Pandu Yuniarto, ATD., M.Eng.Sc.).

JALANNYA RAPAT:

KETUA RAPAT/F-PDIP (LASARUS, S.Sos., M.Si):

Baik.

Bapak-Ibu sekalian,

Kita mulai rapat RDP kita pada siang hari ini, kita sudah terlambat setengah jam.

Assalamualaikum warahamatullahi wabarakatuh,
Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua.

**Pimpinan dan Anggota Komisi V yang saya hormati,
Yang terhormat Sekjen, Irjen, Kepala Badan Kebijakan Transportasi dan Kepala
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Perhubungan
beserta jajaran yang hadir dalam rapat pada siang hari ini,
Hadirin yang berbahagia,**

Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat dan karunianya kita dapat hadir pada siang hari ini untuk melaksanakan rapat sesuai dengan jadwal dan agenda yang sudah kami sampaikan.

Menurut informasi dari Sekretariat telah hadir 20 orang Anggota dari 9 unsur fraksi yang berbeda maka sesuai ketentuan Pasal 281 rapat ini sudah memenuhi kuorum. Izinkan pula kami untuk dapat membuka rapat ini mengacu kepada Pasal 276 ayat (1), Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR RI dengan Sekjen, Irjen, Kepala Badan Kebijakan Transportasi dan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Perhubungan, saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 14.30 WIB)

Terima kasih, kami sampaikan kepada Sekjen, Irjen, Kepala BKT dan Kepala BPSDM Kementerian Perhubungan beserta jajarannya yang telah memenuhi undangan kami untuk hadir dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi V DPR RI pada hari ini. Hari ini kita akan membahas alokasi anggaran menurut fungsi dan program masing-masing unit Eselon I mitra kerja Komisi V DPR R, dalam Nota Keuangan RAPBN Tahun 2024.

**Pimpinan dan Anggota Komisi V yang saya hormati,
Hadirin yang berbahagia,**

Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI dengan Menteri Perhubungan pada hari Rabu yang lalu tanggal 30 Agustus 2023. Telah

disepakati beberapa, hal di antaranya: Komisi V DPR RI memahami penjelasan Kementerian Perhubungan terhadap alokasi anggaran Kementerian Perhubungan Dalam Nota Keuangan RAPBN Tahun 2024 sebesar 38,47 triliun.

Dari alokasi tersebut anggaran untuk Sekretariat Jenderal sebesar 645 miliar, yang diperuntukan untuk mendukung kegiatan antara lain:

1. assesmen kompetensi jabatan dalam lingkup Kementerian Perhubungan,
2. pengelolaan pelayanan pengadaan secara elektronik,
3. penyatuan layanan digital sektor transportasi, serta
4. penyusunan kebijakan teknis kerja sama pembiayaan infrastruktur transportasi.

Selanjutnya, Inspektorat Jenderal sebesar 111 miliar yang akan dipergunakan untuk kegiatan antara lain: audit, *review*, evaluasi, pemantauan dan pengawasan internal Kementerian Perhubungan.

Sementara, anggaran Badan Kebijakan Transportasi sebesar 192 miliar yang akan dipergunakan untuk mendukung kegiatan antara lain:

1. kebijakan transportasi berbasis pengembangan kawasan,
2. kebijakan transportasi logistik dan sistem angkutan umum massal,
3. penyelenggaraan kerjasama dan kolaborasi serta advokasi, sosialisasi dan onev kebijakan bidang LLAJ perkeretaapian, penerbangan dan pelayaran.

Sedangkan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BPSDM memperoleh anggaran sebesar 3,69 triliun yang akan dipergunakan untuk mendukung kegiatan di antaranya pemenuhan sarana dan prasarana Diklat Pemberdayaan Masyarakat, Diklat teknis dan Diklat Vokasi.

Sejalan dengan itu, dalam kesempatan ini kami tegaskan kembali agar dalam proses penyusunan anggaran tahun 2024 agar tiap-tiap unit Eselon I Kementerian Perhubungan benar-benar dapat memperhatikan dan mengakomodir saran, masukan, pendapat dari Komisi V DPR RI.

Selanjutnya, berdasarkan pengawasan yang dilakukan oleh Komisi V DPR RI terdapat sejumlah permasalahan yang perlu mendapat perhatian dari Sekjen, Irjen, Kepala BPSDM, dan Kepala Badan Kebijakan Transportasi antara lain:

1. perlu peningkatan koordinasi baik secara internal maupun eksternal agar terwujud pola kerja yang lebih efektif dan efisien,
2. perlu meningkatkan pengawasan internal dalam rangka meminimalisir temuan dan permasalahan dalam penggunaan anggaran,
3. perlunya meningkatkan kualitas SDM Perhubungan untuk mewujudkan aparatur sipil negara yang dapat mengembangkan inovasi dan profesionalitas,
4. perlu meningkatkan kegiatan sarana dan prasarana transportasi integrasi moda angkutan perkotaan serta keselamatan dan keamanan transportasi.

Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi V DPR RI,

Demikianlah pengantar rapat ini kami sampaikan.

Selanjutnya kami beri kesempatan kepada Eselon I Kementerian Perhubungan yang mengadakan Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi V pada hari ini untuk nanti

menyampaikan masing-masing paparannya dimulai dari Pak Sekjen, nanti dilanjutkan oleh Inspektorat Jenderal, kemudian BPSDM dan terakhir nanti Kepala Badan Kebijakan Transportasi. Kami persilakan.

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI (Ir. NOVIE RIYANTO, MSEA):

Terima kasih, Bapak Ketua.

Bismillahirrahmanirahim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua,
Shalom, om swastiastu, namo budaya dan salam kebajikan.

**Yang saya hormati Bapak Ketua beserta seluruh Anggota Komisi V DPR RI,
Yang saya hormati Bapak Irjen, Bapak Kepala BPSDM, Kepala BKT, serta
Hadirin dan undangan yang berbahagia,**

Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga kita semua dapat menghadiri rapat dengar pendapat dengan agenda membahas alokasi anggaran menurut fungsi dan program Sekretariat Jenderal Tahun Anggaran 2024 dalam keadaan sehat walafiat.

Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Pimpinan dan Anggota Komisi V DPR RI atas dukungan, sinergi dan kolaborasi yang baik selama ini sehingga terbangun kemitraan yang kondusif dalam mendorong kemajuan sektor transportasi nasional.

Bapak Ketua dan Bapak-Ibu Anggota Komisi V DPR RI yang saya banggakan,

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2022, Sekjen memiliki tugas penyelenggaraan koordinasi, pelaksanaan tugas, pembinaan, pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Perhubungan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekjen terdiri dari 15 unit kerja yaitu 7 Biro, 5 pusat dan 2 lembaga non struktural, serta 8 Atase Perhubungan yang berlokasi di Singapura, Kuala Lumpur, Tokyo, Den Haag, London, Montreal, Washington dan Jeddah.

Berdasarkan surat bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas tanggal 31 Juli 2023, total pagu anggaran Kementerian Perhubungan tahun 2024 adalah sebesar 38,47 triliun, dari total pagu tersebut alokasi anggaran untuk Sekjen sebesar 645,57 miliar. Adapun kronologis perencanaan anggaran Sekjen Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan Renstra Sekjen sebesar 1,09 triliun, kemudian diusulkan pagu kebutuhan sebesar 1,24 triliun dan saat ini pada tahap pagu anggaran diperoleh pagu sebesar 645,57 miliar. Komposisi pagu anggaran tersebut terdiri dari belanja pegawai 152,04 miliar atau 23,55% sebagaimana yang ada di-screen ya. Belanja barang oprasional adalah 210,70 miliar atau 32,64%. Belanja barang non oprasional adalah 282,81 miliar atau 43,81%.

Dapat kami laporkan terjadi pergeseran dari pagu indikatif ke pagu anggaran pada Sekjen, yaitu belanja pegawai sebesar 39 miliar dari Sekjen digunakan untuk memenuhi kebutuhan belanja pegawai di BPSDM sebesar 28 miliar, BKT sebesar 7 miliar, dan Dirjen Perkeretaapian sebesar 4 miliar. Namun demikian terdapat pergeseran belanja non oprasional dari BPSDM untuk memenuhi kebutuhan di Sekjen sebesar 15 miliar sehingga terdapat selisih antara pagu anggaran dan pagu indikatif Sekjen sebesar 24 miliar.

Bapak-Ibu yang saya hormati,

Berdasarkan postur pagu alokasi Sekjen anggaran unit kerja Eselon II adalah sebagai berikut: yang pertama adalah Biro Perencanaan sebesar 27,26 miliar, Biro SDM dan Organisasi 18,50 miliar, Biro Keuangan 19,06 miliar, Biro Hukum 15,12 miliar, Biro Umum 286,33 miliar, Biro KIP 26,70 miliar, Biro LPP BMN 31,11 miliar, PFKKI sebesar 15,78 miliar, PPTB sebesar 15,88 miliar, Pusdatin sebesar 63,35 miliar, PPIT sebesar 23,23 miliar, Pusbin Jabatan Fungsional sebesar 14,28 miliar, Mahkamah Pelayaran sebesar 20,79 miliar, KNKT sebesar 44,09 miliar, dan Atase Perhubungan sebesar 24,03 miliar.

Bapak Ketua, Bapak Wakil Ketua dan para Anggota Komisi V DPR RI yang saya hormati,

Secara umum dapat kami sampaikan beberapa kegiatan strategis yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- Biro Perencanaan adalah penyusunan pedoman teknis perencanaan terpadu di lingkungan Kementerian Perhubungan, penyusunan dokumen RKA K/L dan DIPA Kementerian Perhubungan, *monitoring* dan evaluasi terhadap kebijakan tarif,
- Biro SDM dan organisasi antara lain adalah rekrutmen dan pengangkatan pegawai dan pemantauan serta evaluasi reformasi birokrasi,
- Biro Keuangan adalah pembinaan, *monitoring* dan evaluasi pelaksanaan anggaran serta penyusunan target PNBPNP,
- Biro Hukum adalah penyusunan regulasi di bidang transportasi dan pemberian advokasi hukum di lingkungan Kementerian Perhubungan,
- Biro Umum antara lain pengadaan dan pemasangan pembangkit listrik tenaga surya dan pemeliharaan, serta perawatan sarana dan prasarana kantor pusat Kementerian Perhubungan,
- Biro KIP antara lain adalah pelaksanaan kegiatan komunikasi baik internal maupun eksternal, serta pelayanan informasi dan pengaduan Masyarakat,
- Biro LPP BMN antara lain pendampingan hukum kelompok kerja di lingkungan Kemenhub dan pembinaan, *monitoring* serta inventarisasi evaluasi dan verifikasi pengelolaan BMN di lingkungan Kemenhub,
- PFKKI dan Atase Perhubungan antara lain adalah memfasilitasi kerja sama dalam negeri dan penyelenggaraan kerja sama luar negeri dalam ruang lingkup hubungan bilateral dan multilateral, serta regional atau sub-regional dan *monitoring* evaluasi serta koordinasi efektivitas kinerja

perwakilan Kementerian Perhubungan di luar negeri ataupun Atase Perhubungan,

- untuk PPTB antara lain adalah penyiapan pengelolaan kebijakan lingkungan hidup, dampak sektor transportasi, adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim,
- Pusdatin antara lain adalah peningkatan fungsi sistem pendukung data spasial transportasi dan peningkatan infrastruktur dan kapasitas data *center*,
- PPIT antara lain adalah penyusunan studi identifikasi proyek pembinaan pembiayaan infrastruktur transportasi dan pelaksanaan pengawasan serta evaluasi proyek pembinaan infrastruktur transportasi,
- Pusat pembinaan jabatan fungsional transportasi antara lain adalah penyusunan pedoman perhitungan formasi dan penyusunan standar kompetensi jabatan fungsional transportasi,
- Mahkamah Pelayaran adalah verifikasi dan penelitian informasi data awal kecelakaan kapal dan pelaksanaan sidang pemeriksaan lanjutan kecelakaan kapal Mahkamah Pelayaran,
- yang terakhir adalah KNKT antara lain adalah pelaksanaan investigasi transportasi dan kerja sama investigasi kecelakaan transportasi.

Demikianlah beberapa hal yang dapat kami sampaikan pada agenda rapat dengar pendapat pada hari ini.

Selanjutnya, kepada Bapak-Ibu yang terhormat, kami mohon masukan, saran, dan pendapat dari Pimpinan serta Anggota untuk penyempurnaan dan peningkatan kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan di saat ini dan ke depan.

Sekian.

Terima kasih.

Wabillahi taufiq walhidayah.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua.

Shalom om santi santi santi om, namo budaya, salam kebajikan.

KETUA RAPAT (H. MUHAMMAD IQBAL, S.E., M.Com.):

Iya, terima kasih Pak Sekjen atas paparannya.

Selanjutnya kami persilakan kepada Pak Inspektorat Jenderal untuk memberikan paparannya, silakan Pak.

INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI (Ir. ARIF TOHA TJAHHAGAMA, DEA):

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua.

**Yang terhormat Bapak Ketua dan Bapak Wakil Ketua serta Bapak-Ibu Anggota Komisi V DPR RI,
Yang kami hormati Bapak Sekjen, Bapak Kepala BPSDM, Bapak Kepala BKT, dan Hadirin dan peserta RDP yang berbahagia,**

Pertama-tama, kami mengucapkan terima kasih atas dukungan, masukan dan saran yang telah disampaikan oleh Bapak-Ibu Komisi V kepada kami sehingga kami bisa melaksanakan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Jenderal dengan baik sepanjang tahun 2023 ini. Dan kami terus memohon dukungan Bapak-Ibu sekalian agar kami dapat terus melaksanakan tugas ini dengan lebih baik.

**Bapak Ketua dan Bapak Wakil Ketua, serta
Para Bapak-Ibu Anggota Komisi V,**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), Inspektorat Jenderal melaksanakan pengawasan intern terhadap seluruh kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi kementerian negara dan lembaga yang didanai dengan APBN. Kegiatan-kegiatan pengawasan tersebut dilakukan dengan melakukan pengawasan fungsional terhadap *auditee* dalam hal ini *assurance*. Kemudian bimbingan dan konsultasi terhadap peningkatan kinerja dalam hal ini adalah konsultan serta mendorong terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih atau *good governance* dalam hal ini adalah fungsi katalis.

Ke depan, Inspektorat Jenderal sebagai pengawas internal dituntut untuk berperan aktif dalam mengawal implementasi kebijakan dan Kementerian Perhubungan. Selain peran dan fungsi *assurance* melalui pelaksanaan pengawasan, peran Inspektorat Jenderal terus mulai ditingkatkan sebagai *strategic partner* dan *trusted advisor* melalui peningkatan peran *assurance* dan *consulting* sehingga kegiatan-kegiatan pengawasan yang dilakukan dapat berdampak terhadap peningkatan kinerja organisasi, memberikan keyakinan memadai bahwa proses kegiatan yang dijalankan menghasilkan *output* dan *outcome*, bertindak sebagai mitra manajemen serta juga dapat berperan sebagai penasihat yang memberikan pendapat tambahan sebelum Pimpinan memutuskan sebuah kebijakan.

Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan Pimpinan dan Anggota Komisi V dalam meningkatkan alokasi anggaran pengawasan internal. Dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 alokasi anggaran pengawasan internal mengalami kenaikan dengan proporsi sebesar 0,23% sampai dengan saat ini yaitu 0,21% dari total alokasi anggaran Kementerian Perhubungan. Berdasarkan surat bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN Kepala Bappenas, serta surat Menteri Perhubungan tentang Usulan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2024. Inspektorat Jenderal mendapatkan alokasi pagu anggaran sebesar 111.108.529.000 atau sebesar 0,29% dari total pagu anggaran Kementerian Perhubungan sebesar 38,477 triliun. Pagu anggaran Inspektorat Jenderal Tahun Anggaran 2024 ini masih di bawah usulan pagu kebutuhan yaitu sebesar 141,2 miliar.

Sebaran anggaran pada kegiatan-kegiatan Inspektorat Jenderal sesuai pagu anggaran Inspektorat Jenderal Tahun Anggaran 2024 sebesar 111,1 miliar tersebut terdiri dari:

1. belanja pegawai untuk belanja gaji dan tunjangan 365 pegawai senilai Rp46,86 miliar atau 42,18% dari pagu Itjen Tahun Anggaran 2024,
2. belanja barang oprasional senilai 7,44 miliar atau 6,7% dari pagu Itjen Tahun Anggaran 2024 antara lain untuk belanja pemeliharaan, pengadaan pakaian dinas, langganan daya jasa, honorarium pengemudi, pramubakti, honorarium pengelola anggaran dan perawatan sarana kantor,
3. belanja barang non operasional senilai Rp50,1 miliar atau 45,1% dari pagu Itjen Tahun Anggaran 2024 yang terdiri dari:
 - a. Kegiatan pengawasan internal senilai Rp29,5 miliar atau 26,55% dari pagu Itjen Tahun Anggaran 2024 di mana nilai tersebut mengalami pengurangan dari usulan pagu kebutuhan Itjen tahun 2024 senilai Rp52,37 miliar yang diantaranya mencakup kegiatan seperti audit kinerja, audit dengan tujuan tertentu, *review*, evaluasi, pemantauan, pemutakhiran tindak lanjut laporan hasil audit intern dan ekstern dan pendampingan mutasi manajemen resiko,
 - b. Kegiatan dukungan manajemen dan tata kelola pengawasan senilai Rp20,3 miliar atau 18,55% dari pagu Itjen Tahun Anggaran 2024 di mana nilai tersebut mengalami pengurangan dari usulan pagu kebutuhan Itjen tahun 2024 senilai Rp27,18 miliar, yang di antaranya mencakup kegiatan pengembangan kompetensi SDM, dukungan teknologi informasi, kemitraan dan kerjasama komite audit dan peningkatan kapabilitas audit, selanjutnya
4. belanja modal terdiri dari pengadaan laptop, peralatan perkantoran dan renovasi ruang kerja senilai 6,67 miliar atau 6,03% dari pagu Itjen tahun 2024.

Bapak Pimpinan, Bapak-Ibu para Anggota Komisi V yang terhormat,

Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan sebagai unsur pengawasan Kementerian Perhubungan yang mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Perhubungan memiliki sumber daya manusia sebanyak 365 pegawai yang terdiri dari 219 Auditor, 119 non Auditor dan 27 PPNPN. Saat ini, 48% pegawai Itjen berpendidikan minimal D-4 atau S-1 dan 47% Auditor Itjen memiliki sertifikasi keahlian tambahan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai aparatur pemeriksa intern Pemerintah.

Saat ini, Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan memiliki 6 *eh* maaf, memiliki 9 alat dukungan teknologi informasi dan komunikasi untuk membantu dan mempermudah menjalankan tugas dan fungsi pengawasan internal. Aplikasi tersebut antra lain adalah:

1. SIAU (Sistem Informasi Audit).
2. SIMADU (Sistem Informasi Manajemen Pengaduan).
3. SISILA (Sistem Informasi Prestasi dan Cella) dan lain-lain.

Dengan sumber daya yang kami miliki saat ini, kami diberikan tanggung jawab sebagai APIP Kementerian Perhubungan untuk mengawasi sebanyak 593 objek pengawasan, 254 kegiatan prioritas nasional, 30.200 pegawai Kementerian

Perhubungan, 2.650 kegiatan strategis, dan Rp9,5 triliun potensi PNBP, 36 proyek strategis nasional, dan 38,477 triliun anggaran Kementerian Perhubungan.

Secara umum, dapat kami sampaikan fokus pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan tahun 2024 berdasarkan pengawasan berbasis resiko antara lain:

1. melalui pemetaan resiko, *remote audit* dan *mandatory* yang terdiri dari audit kinerja, audit dengan tujuan tertentu, *review*, evaluasi, pemantauan dan pengawasan intern lainnya,
2. pengawasan berbasis prioritas yang meliputi proyek strategis nasional dan prioritas nasional, subsidi perintis dan PSO, Padat Karya dan kebudayaan masyarakat, perencanaan dan manfaat pelayanan publik, pengelolaan PNBP dan BLU, pengadaan barang dan jasa dan masalah yang menjadi fokus perhatian Kementerian Perhubungan.
3. Peran *inside* dan *foreside* melalui optimalisasi fungsi *consultant*. Yang pertama adalah melalui pemantauan dan pendampingan, peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik, implementasi sistem pengendalian intern dan pendampingan penerapan manajemen resiko.

Bapak Pimpinan dan Bapak-Ibu Anggota Komisi V yang terhormat.

Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo melalui kegiatan rapat terbatas evaluasi prioritas strategi nasional memberikan arahan kepada seluruh penyelenggara pemerintahan agar seluruh prioritas strategi nasional bisa selesai fisik sebelum 2024 dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta dapat menciptakan efek ganda bagi perekonomian. Dalam melaksanakan pengawasan tersebut Inspektorat Jenderal sebagai *strategic partner* dan *trusted advisor* melalui peran *assurance* dan *consulting* bekerja sama dengan masing-masing pemangku kepentingan dalam memastikan seluruh proyek-proyek strategis dapat terselesaikan sesuai dengan target-target yang disepakati. Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan melalui usulan program pengawasan tahun 2024 memberikan perhatian khusus terhadap penyelesaian proyek-proyek strategis yang menjadi tanggung jawab dari Kementerian Perhubungan di samping strategis yang lain yang menjadi fokus perhatian Pimpinan.

Kementerian Perhubungan diberikan amanah untuk menyelesaikan 36 proyek strategis nasional dari seluruh sektor transportasi baik darat, laut, udara, maupun perkeretaapian. Lebih lanjut proyek strategis nasional yang sudah selesai konstruksi adalah sebanyak 17 proyek. Selesai tahun 2023-2024 adalah sebanyak 12 proyek dan selesai setelah 2024 sebanyak 7 proyek. Adapun proyek prioritas yang menjadi fokus Kementerian Perhubungan adalah pada tahun 2024 yaitu: Dirjen Perhubungan Darat sebanyak 14 kegiatan, Dirjen Perhubungan Laut sebanyak 30 kegiatan, Dirjen Perhubungan Udara sebanyak 49 kegiatan dan Dirjen Perkeretaapian sebanyak 34 kegiatan, serta BPSDM sebanyak 2 kegiatan sehingga Inspektorat Jenderal melalui perannya sebagai pengawas Kementerian Perhubungan akan turut serta berkontribusi dalam memastikan terselesaikannya proyek prioritas tersebut.

Dalam rangka upaya mewujudkan tugas dan fungsi Itjen sebagai APIP Kementerian Perhubungan, kami memiliki strategi pencapaian pengawasan Itjen yang

terbagi menjadi 5 target besar yaitu: *remote* dan *desk audit*, serta pemetaan resiko melalui kegiatan audit kinerja, audit dengan tujuan tertentu, *review*, evaluasi dan pemantauan. Juga digitalisasi pengawasan yang terbagi menjadi 3 yaitu: *assurance*, *consulting* dan *governance*, serta penguatan regulasi pengawasan melalui pedoman dan petunjuk teknis.

Kami juga melakukan peningkatan koordinasi dan sinergi pengawasan bersama BPKP, BPK, KPK, Polri, Kejaksaan, LPSK, PPATK, APIP Pemda dan juga Kemenpan RB. Kami juga melakukan peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui sertifikasi pengawasan, pelatihan penjejaran auditor ahli pertama, ahlli muda dan ahli madya, serta *workshop* dan juga bimbingan teknis, serta pelatihan teknis pengawasan. Dalam merealisasikan strategi-strategi tersebut kami menyadari adanya keterbatasan anggaran dan ruang lingkup pengawasan yang besar sehingga diperlukan dukungan lebih dari seluruh *stakeholder* yang terlibat.

Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan pada agenda Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR RI hari ini. Kami mohon dukungan, saran, dan masukan dari Bapak Pimpinan dan Bapak-Ibu Anggota Komisi V yang terhormat dalam melaksanakan anggaran Tahun Anggaran 2024.

Terima kasih.

Billahitaufiq walhidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabaraktuh.

KETUA RAPAT:

Waalaikumsalam.

Terima kasih, Pak Irjen.

Selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Kepala, silakan Pak.

KEPALA BPSDM-P KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI (Dr. Ir. DJOKO SASONO, M.Sc.):

**Pimpinan dan Anggota Komisi V DPR RI yang terhormat,
Yang kami hormati Pak Sekjen, Pak Irjen, Pak Kepala BKT, serta
Hadirin undangan sekalian,**

Assalamualaikum warahmatullahi wabaraktuh.

Pimpinan dan Anggota Komisi V yang terhormat,

Izinkan kami melaporkan bahwa pagu anggaran BPSDM Perhubungan untuk tahun 2024 adalah 3,693 triliun. Anggaran ini terdiri dari dua program yaitu yang terbesar adalah program pendidikan dan pelatihan vokasi 67,69%. Untuk kegiatan pendidikan transportasi, pengembangan SDM Perhubungan dan sebagainya yang tertuang dalam anggaran non anggaran pendidikan serta anggaran pendidikan. Program yang kedua adalah dukungan manajemen berupa kegiatan pengembangan

SDM Aparatur Perhubungan, (*suara kurang jelas*) Perhubungan, (*suara kurang jelas*) transportasi yang tertuang dalam belanja pegawai, belanja barang oprasional dan belanja non operasional.

Dari pagu anggaran ini yang terbesar bersumber dari rupiah murni lebih dari 2 triliun atau 62,49%, kemudian diikuti oleh BLU sebesar 32,2% atau 1,18 triliun, serta SBSN 182 miliar atau 4,94%, serta PNBPN sebesar 13 miliar atau 0,37%. Yang tertuang dalam belanja barang operasional sebesar 17,7% atau 653 miliar, untuk belanja pegawai sebesar 9,03% atau 33 miliar lebih, belanja barang non operasional yaitu 54,35%, yang terdiri dari beberapa kegiatan setara dengan 2 triliun lebih serta belanja modal hampir 700 miliar atau setara dengan 18,93 miliar.

Dari angka tersebut dialokasikan untuk kegiatan prioritas nasional yaitu untuk kegiatan Diklat, Diklat BPM dan kegiatan pemenuhan sarana-prasarana dengan total anggaran adalah 1,45 triliun atau 39,40%. Selanjutnya, untuk kegiatan pemenuhan prasarana sebesar 320 miliar atau setara dengan 10,3%, dilanjutkan dengan total anggaran untuk kegiatan strategis sebesar 750 miliar atau 21,4%. Sedangkan sisanya adalah untuk total anggaran kegiatan non prioritas nasional sebesar 1,067 triliun atau 28,9% untuk kebutuhan operasional Diklat teknis dan sebagainya.

Tentang rincian dari pada kegiatan ini terdiri dari 32 Satker yang mana untuk rupiah murni sebesar 2,3 triliun, untuk PNBPN atau BLU 1,2 triliun, untuk SBSN kami ada 2 ada di 2 Satker di Poltek Bali dan PB Madiun sebesar 145 miliar dan totalnya 3,693 triliun. Rinciannya yang kami sampaikan secara terlampir.

Selanjutnya, izin kami melaporkan dari pelaksanaan anggaran itu kita peruntukan untuk pembinaan, pembangunan, pembentukan, pola pembibitan, saat ini di kampus di seluruh Indonesia di 22 sekolah ada 11.000 taruna pembibitan yang mana aggarannya sekitar 500 miliar.

Selanjutnya, kami ingin melaporkan bahwa terkait dengan Diklat Pemberdayaan Masyarakat (DPM), kami laksanakan di semua sekolah di 25 lembaga pendidikan kami. Di mana saat ini kita merencanakan untuk bisa menampung 100.405 peserta, dengan alokasi anggaran sebesar 148 miliar lebih, dengan nanti sebarannya bisa kami laporkan di secara terlampir. Saat ini sudah berapa dilakukan dan kami mohon nanti dari para Anggota yang terhormat bisa kami diberikan arahan untuk nanti bersama dengan tenaga ahli untuk bisa berkomunikasi untuk pelaksanaan Diklat Pemberdayaan Masyarakat ini. Sedangkan untuk program Padat Karya, sebenarnya kami hanya bisa melaksanakan sebagian daripada kegiatan itu, diumpamakan dengan pelibatan orang. Ya, di mana secara totalnya untuk seluruh kegiatan adalah sekitar 5,6 miliar rupiah lebih.

Ibu-Bapak sekalian, Pimpinan dan Anggota Komisi V yang terhormat,

Demikian yang bisa kami laporkan, mohon arahan dan dukungan.

Terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Walaikumsalam.

Selanjutnya kami persilakan pada Kepala Badan Kebijakan Transportasi, silakan Pak.

KEPALA BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI (PANDU YUNianto, ATD., M.Eng.Sc.):

Terima kasih, Bapak Pimpinan.

**Yang terhormat Pimpinan Komisi V beserta Anggota Komisi V,
Yang saya hormati Bapak Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan,
Yang saya hormati Bapak Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan,
Yang saya hormati Bapak Kepala BPSDM Perhubungan, serta
Seluruh pejabat di lingkungan Kementerian Perhubungan yang ikut hadir dalam rapat dengar pendapat pada sore hari ini,**

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua,
Om swastiastu namo budaya, salam kebajikan.*

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah memberikan kesehatan kepada kita semua sehingga kita bisa bertemu dalam rapat dengar pendapat pada sore hari ini. Dalam kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Pimpinan dan seluruh jajaran Anggota Komisi V yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk ikut dalam rapat dengar pendapat pada sore hari ini. Dalam kesempatan ini izinkanlah kami menyampaikan rencana alokasi anggaran menurut fungsi dan program Badan Kebijakan Transportasi Tahun RAPBN 2024.

Bapak Pimpinan dan Bapak-Ibu Anggota Komisi V yang terhormat,

Posisi pagu anggaran Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2024 adalah sebesar 192,9 miliar. Alokasi ini mengalami kenaikan sebesar 15% jika dibandingkan dengan DIPA tahun 2023. Sementara itu, jika dibandingkan dengan posisi usulan pagu indikatif tahun 2024 terdapat penambahan belanja sebesar 7 miliar atau sekitar 4%, yang mana ini nanti akan digunakan untuk kekurangan belanja pegawai. Jika disandingkan dengan Renstra maupun usulan pagu kebutuhan tahun 2024, masih terdapat *gap* yang cukup jauh disebabkan keterbatasan ruang fisik dan hal tersebut sedikit banyak mempengaruhi kapasitas Badan Kebijakan Transportasi untuk dapat mengakomodir kebutuhan analisis permasalahan sektor transportasi yang cukup banyak dan kompleks. Namun demikian, Badan Kebijakan Transportasi tetap berupaya dan bekerja taktis guna mengoptimalkan alokasi yang ada dengan cara kolaborasi bersama lembaga akademik, lembaga riset maupun asosiasi untuk melakukan *join* analisis.

Bapak Pimpinan, Bapak-Ibu Anggota Komisi V yang terhormat,

Dapat kami laporkan bahwa komposisi pagu anggaran Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2024 sebesar 192,9 miliar tersebut berdasarkan fungsi dan program terdiri atas:

1. program infrastruktur konektivitas sebesar 107,2 miliar yang terdiri dari:
 - a. seratus empat puluh *eh* maaf-maaf, 14,2 miliar digunakan untuk kajian rekomendasi kebijakan terkait dengan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang transportasi yaitu rekomendasi yang berdampak pada perubahan penggantian maupun usulan regulasi baru. Selanjutnya 33,7 miliar akan digunakan untuk kajian rekomendasi kebijakan pembangunan dan isu strategis sektor transportasi yaitu rekomendasi kebijakan terhadap program pembangunan yang sedang dan akan dijalankan oleh Kementerian Perhubungan guna memastikan optimalnya *outcome* dan nilai tambah dari suatu program Pembangunan.

Selanjutnya 7,9 miliar akan digunakan untuk kajian kebijakan pendukung program prioritas nasional RPJMN 2020-2024. Yaitu rekomendasi terkait dengan *major project* sektor transportasi yang ada dalam RPJMN 2020-2024, antara lain adalah arah kebijakan pembangunan transportasi di IKN, arah kebijakan pembangunan transportasi untuk mendukung 3TP, KSPN dan lain-lainnya.

Selanjutnya 51,2 miliar akan digunakan untuk kegiatan percepatan implemetasi kebijakan sektor transportasi yang meliputi agenda *mapping* isu strategis, advokasi kebijakan, sosialisasi kebijakan dan pengendalian mutu kualitas kebijakan sektor transportasi.

2. berupa program dukungan manajemen sebesar 85,6 miliar yang akan digunakan:
 1. Pertama untuk pemenuhan kebutuhan belanja mengikat termasuk gaji, sebesar 67,1 miliar, dan
 2. adalah pemenuhan kebutuhan belanja tidak mengikat untuk menunjang Tupoksi administrasi seluruh unit kerja di lingkungan Badan Kebijakan Transportasi sebesar 18,5 miliar.

Bapak Pimpinan dan Bapak-Ibu Anggota Komisi V yang terhormat,

Dalam rangka penguatan agenda perumusan kebijakan dan kegiatan prioritas tahun 2024, Badan Kebijakan Transportasi telah dan sedang menjalankan serangkaian tahapan koordinasi lintas *stakeholder* baik internal Kementerian Perhubungan maupun di luar Kementerian Perhubungan. Berdasarkan proses identifikasi, seleksi dan koordinasi yang Badan Kebijakan Transportasi lakukan maka *highlight* kegiatan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. ditargetkan terbitnya 67 rekomendasi kebijakan sektor transportasi yang terdiri dari 15 rekomendasi kebijakan terkait dengan norma, standar, prosedur dan kriteria sektor transportasi, kemudian,
2. 18 rekomendasi kebijakan terkait program pembangunan pengembangan transportasi di bidang sarana, prasarana integrasi moda dan lalu lintas angkutan serta keselamatan dan keamanan transportasi,

3. 10 kebijakan rekomendasi kebijakan untuk mendukung program prioritas nasional diantaranya adalah terkait dengan IKN, logistik, KSPN, 3TP dan sistem angkutan masal,
4. 24 analisis isu strategis yang menjadi direktif Menteri Perhubungan pada tahun berjalan.

Badan Kebijakan Transportasi juga memprogramkan kegiatan koordinasi lintas *stakeholder* untuk mendorong percepatan implementasi kebijakan transportasi berupa agenda *mapping*, advokasi, sosialisasi kebijakan yang dilaksanakan dengan melibatkan seluruh *stakeholder* dan termasuk kolaborasi dengan Komisi V DPR RI untuk mensosialisasikan kebijakan Pemerintah terkait pengembangan dan pembangunan sektor transportasi.

Bapak Pimpinan, Bapak-Ibu Anggota Komisi V yang terhormat,

Seluruh kegiatan Badan Kebijakan Transportasi baik yang terkait dengan proses observasi kajian di lapangan maupun kegiatan yang terkait dengan pemetaan isu strategis dan sosialisasi telah dioptimalkan untuk dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Adapun pemilihan lokasi observasi sejumlah hal menjadi pertimbangan di antaranya adalah karakteristik wilayah. Hal ini penting mengingat suatu kebijakan belum tentu dapat diberlakukan secara merata untuk seluruh wilayah. Dengan *key point* isu kebijakan yang mencakup antara lain adalah *review* Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan di Bidang Angkutan Jalan, kemudian pengembangan angkutan sungai dan pelabuhan Indonesia Timur tol laut dan lain-lain.

Kebijakan terkait dengan sub sektor penerbangan terdapat 14 lokasi observasi yang tersebar di regional Papua, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Jawa dan Sumatera. Dengan *key point* isu kebijakan yang mencakup diantaranya skema pengelolaan bandara, skema tarif angkutan udara, layanan keperintisan dan lain-lain. Secara lebih *detail* terkait dengan penjelasan dan profil kebijakan dimaksud telah kami jabarkan di dalam lampiran bahan persentasi. Perlu kami sampaikan bahwa penentuan lokasi observasi lapangan hanya bersifat *something* data yang nantinya akan menjadi kebijakan untuk dapat diterapkan secara nasional. Selain itu, untuk penguatan proses implementasi kebijakan maka di tahun 2024, kami juga memprogramkan pertama adalah kegiatan pemetaan isu strategis di 12 lokasi, kemudian kegiatan sosialisasi kebijakan di 12 lokasi.

Bapak Pimpinan dan Bapak-Ibu Anggota Komisi V yang terhormat,

Demikianlah beberapa hal yang dapat kami sampaikan dan kami dari Badan Kebijakan Transportasi akan berkomitmen untuk dapat merumuskan rekomendasi kebijakan sektor transportasi yang tepat sasaran dan implementatif serta mengedepankan kolaborasi seluruh *stakeholder*.

Selanjutnya kami mohon arahan, tanggapan dan masukan dari Bapak dan Ibu Anggota Komisi V.

Demikian.

Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Om santi santi om, shalom, namo budaya.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baiklah, selanjutnya kami persilakan kepada para Anggota Komisi V untuk memberikan tanggapan ataupun pertanyaan.

Yang pertama saya persilakan kepada Bapak Willem, kemudian selanjutnya setelah itu Ibu Sri siap-siap, silakan Pak Willem. Nanti, Ibu Sri dulu kalau gitu Bu Sri.

F-PDIP (SRI RAHAYU):

Terima kasih, Pimpinan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

**Pimpinan dan Anggota yang saya hormati,
Pak Sekjen, Pak Irjen, Pak BPSDM, satunya program ya perencanaan program
dan seluruh jajaran,**

Yang pertama yang dari Pak Sekjen, halaman 5, Pak, saya ingin tanya halaman 5, di situ saya menyoroti yang Pusdatin dan Atase Perhubungan. Untuk Pusdatin ini anggarannya cukup lumayan ya meskipun miliar, ini Pusat Data maksudnya untuk data apa saja yang ada di sini. Kemudian di tahun 2024 itu data apa yang perlu di atau apa perlu di apakah itu dikembangkan, apakah itu ditambah datanya atau apa saya mohon penjelasan.

Kemudian yang kedua Atase Perhubungan, anggarannya ini kan kecil sekali, Pak. Kalau saya perhatikan program-programnya ini kan banyak *banget gitu*. Ada membuat apa itu menyusun naskah dan ratifikasi perjanjian Internasional, kemudian fasilitasi kerja sama dan yang paling banyak juga ada pelaksanaan bantuan delegasi dan seterusnya itu menurut saya kegiatan yang perlu biaya. Yang ingin saya tanyakan adalah penyusunan naskah dan ratifikasi perjanjian Internasional, ini perjanjian apa saja yang sekiranya akan diratifikasi. Dan ini kan perjanjian Internasional tentu naskah yang dimaksud adalah naskah dari perjanjian ratifikasi itu sendiri. Untuk itu, saya mohon untuk dijelaskan dan sampai sejauhmana perannya sampai hari ini, Pak, perkembangannya seperti apa dan kira-kira ke depan apa sebenarnya yang paling dibutuhkan untuk Atase Perhubungan ini. Karena menurut saya ini mungkin juga kaitannya juga kalau ada di Mekkah ya, ada juga mungkin yang lain-lain sampai sejauhmana ini kebutuhan atau kepentingan ke depan.

Kemudian yang kedua dari Pak Irjen, saya melihat halaman 7, Pak, salah satu di antaranya adalah pengawasan terhadap Bandar Udara Kediri. Bandar Udara Kediri ini kan *unsolicited* ya, Pak ya, artinya pembiayaan dari pihak swasta semua. Lalu mekanisme sistem atau apa yang dilakukan oleh Bapak di dalam pengawasan ini. Karena setahu saya 2023 juga belum ada penerbangan 2024 juga belum, sehingga anggaran negara mungkin belum keluar untuk bandara itu. Oleh karena itu, saya mohon penjelasan terkait dengan hal tersebut. Dan kemudian dalam *breakdown*

Bapak itu Dirjen PPH Darat, PPH Laut, Udara dan seterusnya itu programnya jumlahnya beda-beda dan itu Udara jauh lebih banyak. Mohon saya dijelaskan, Pak, kira-kira apa yang menyebabkan kalau di Darat justru kegiatannya cuma dikit begitu, apa sebabnya begitu atau mungkin ada kriteria tertentu.

Kemudian yang selanjutnya BPSDM. Mohon dijelaskan, Pak, pola pembibitan itu apa maksudnya saya *enggak* paham untuk pola pembibitan yang pada halaman 11 Bapak paparkan itu ya. Kemudian mungkin kalau bisa diberikan contoh ya saya ingin tahu kampusnya kayak apa, misalkan yang API Banyuwangi ini sepertinya kan baru. Kalau saya lihat mungkin mahasiswanya itu ya 250 itu, kalau untuk API Banyuwangi mungkin kereta api ya, Pak ini, API ini, apa ya, pelayaran atau apa singkatannya saya *enggak ngerti*.

KEPALA BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI (PANDU YUNianto, ATD., M.Eng.Sc.):

Izin Ibu, Akademi Penerbang, Ibu.

F-PDIP (SRI RAHAYU):

Penerbang ya, bedanya Poltekbang?

KEPALA BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI (PANDU YUNianto, ATD., M.Eng.Sc.):

Kalau Poltekbang kebetulan tidak ada Prodi Penerbang, jadi terkait dengan penerbangan, lalu lintas udara, teknik pesawat dan segala macam.

F-PDIP (SRI RAHAYU):

Perawatan.

F-PDIP (SRI RAHAYU):

Kalau yang API itu hanya mencetak penerbang, saat ini sedang berkembang juga Prodi tambahan untuk perawatan pesawat.

F-PDIP (SRI RAHAYU):

Makanya saya lihat jumlahnya hanya 94 ya untuk pembibitan ini pada tahun 2024, kalau volumenya hanya 94. Ini artinya kan 94 orang kan yang dididik ini, memang jumlahnya banyak dari yang lain-lain. Apakah dalam pendidikan ini semuanya beasiswa atau seperti apa, Pak, ini? tolong kami dijelaskan. Soalnya biasanya kalau menggunakan beasiswa itu kan seperti ikatan dinas begitu ya, itu kan setelah itu mesti dikerjakan di mana dipekerjakan di mana *gitu*. Soalnya saya melihat di Surabaya itu ada kebetulan ada anaknya teman itu setelah lulus *kok yo enggak* kerja *gitu*. Apa itu memang pilihannya atau seperti apa? saya mohon dijelaskan.

Kalau urusan anggaran sih kayanya *enggak* terlalu besar ya karena ini pendidikan pasti banyak dosen yang untuk digaji, kemudian yang lain-lain. Yang yang

satu menjadi perhatian saya tadi yang API itu ya akademi penerbang saya *enggak* bisa membayangkan kalau jumlahnya hanya 94, kemudian ini kampusnya kayak apa *gitu* lalu siapa aja yang ada di situ. Kalau saya lihat kan hanya 250 orang yang ada di API ini.

Saya kira itu dari saya, Pak. Untuk kebijakan apa namanya ini tadi saya belum sempat buka-buka nanti mungkin kalau ada tambahan.

Terima kasih, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Iya, selanjutnya Pak Willem apakah sekarang atau nanti? nanti. Kalau begitu Pak Sumail, silakan Pak Sumail.

F-P. GERINDRA (Ir. SUMAIL ABDULLAH):

Terima kasih, Pimpinan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat siang, serta salam sejahtera bagi kita semuanya.

Yang saya hormati Pak Sekjen, Pak Irjen, Bapak Kepala Badan Kebijakan Transportasi Publik dan BPSDM,

Pertama catatan saya terhadap Pak Sekjen sebagaimana yang Ibu tadi sampaikan Bu Sri Rahayu, bahwa kaitannya dengan Atase, saya ingin mempertegas. Jadi keberadaannya ini harus betul-betul kita optimalkan, maksud saya begini, anggarannya sedikit tugasnya banyak tetapi apa manfaatnya dengan kita. Minimal ada sisi-sisi baik yang di mana Atase itu ditempatkan kaitannya dengan kebaikan transportasi di kita. Contoh kecilnya misalnya. Di Jakarta hari ini kita dikenal polusinya terburuk di seluruh dunia. *Nah*, tentu harus ada kerja sama dengan negara-negara tersebut kaitannya dengan Atase di tempat di negara di mana dia tinggal. Jadi apa kira-kira saran-saran ataupun masukan-masukan kaitannya dengan polusi udara yang semakin memburuk di Jakarta ini. Ini juga berkaitan dengan kebijakan transportasi publik. Kita ketahui bahwa ada banyak moda transportasi di Jakarta, Pak, MRT-nya ada, LRT-nya ada, *busway*-nya juga ada. Jangan sampai moda-moda transportasi yang menumpuk ini menjadi satu justru menjadi sumbangsih apa kualitas udara yang ada di Jakarta. *Nah*, sementara daerah-daerah lain masih kekurangan untuk fasilitas transportasi-transportasi yang bersumber dari APBN ini. Maksud kami mohon ada kajiannya sejauhmana efektivitas dan efisiensinya selain terhadap pertumbuhan ekonomi yang ada di Jakarta kaitannya dengan penyumbang buruknya udara yang ada di Jakarta.

Yang berikutnya kaitannya dengan Pak Irjen, tentu selain apa Namanya untuk pengawasan internal, Pak Irjen, ada beberapa banyak bandara dan pelabuhan yang hari ini juga tidak berfungsi dengan baik. Apa hasil kajian daripada Pak Irjen ini kan karena bandara dan pelabuhan itu operasionalnya juga banyak menggerus APBN, Pak. Paling tidak bahwa sebelum *project* itu dilakukan, ada masukan yang begitu baik dari Pak Irjen kaitannya sejak dari perencanaan, Pak, seperti itu. Sayang sekali APBN

yang begitu besar yang baik yang bersumber dari APBN murni dari masyarakat maupun *loan*. Contoh misalnya Patimban, diharapkan tadinya ada (*suara kurang jelas*) juga berlabuh di sana untuk membawa komoditi-komoditi atau ekspor ke luar negeri. Nyatanya sampai sekarang kami mendengar bahwa hanya ada dua kapal yang kapasitasnya kecil karena dulu disampaikan bahwa Patimban ini merupakan pelabuhan terbesar ke-2 setelah Tanjung Priok tetapi hingga hari ini juga tidak berfungsi dengan baik.

Yang kedua tentang Bandara Kertajati, Pak. Kami mendengar juga tiap bulan bahkan operasional bisa 4-5 miliar, sementara tidak ada pesawat juga yang nangkring ke sana. Ya, walaupun misalnya ada tempo hari di awal-awal tapi tidak berlangsung secara lama seperti itu. Ini mohon apa namanya catatan Bapak terhadap keberadaan ini ya yang tidak sesuai dengan harapan itu.

Berikutnya tentang BPSDM. Tadi juga Ibu Sri Rahayu menyampaikan ada beberapa sekolah-sekolah yang di bawah lingkungan atau naungan Bapak kan. Kami sangat sedih juga mendengar, Pak, begitu ada lulusan juga tidak bisa bekerja kan. Artinya penyiapan dari sisi tenaga apa namanya keberadaan sumber daya kaitannya dengan kemajuan transportasi yang berkelanjutan, itu tidak tercermin di sini. Yang keduanya, Bapak Kepala BPSDM bahwa saya mendengar juga sekolah-sekolah ini ada banyak didominasi oleh anak-anak dari Kementerian Perhubungan ya dalam rangka untuk keberlangsungannya lah kayak *gitu*. Nah, ini mohon informasi-informasi ini bisa juga diminimalisir dan berikan kesempatan kepada anak-anak kita ya dengan apa sumber daya biaya yang minimal barangkali untuk dapatkan beasiswa-beasiswa.

Saya kira itu, Pak Ketua, catatan dari saya.

Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Walaikumsalam.

Selanjutnya kami persilakan Pak Aras, silakan Pak Aras kemudian siap-siap Ibu Cen setelah itu.

F-PPP (Dr. H. MUH. ARAS, S.Pd., M.M.):

Terima kasih, Pimpinan.

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua.

**Yang terhormat Pimpinan dan segenap kawan-kawan Anggota Komisi V,
Yang saya hormati Pak Dirjen, Pak Irjen, Kepala BPSDM, Kepala BKT ya,
biasanya banjir kanal timur Pak, dan**

Seluruh jajaran yang sangat saya hormati,

Terima kasih paparan yang telah diberikan oleh mitra kita yang cukup detail dan ada beberapa hal yang ingin saya tanggapi. Yang pertama terkait dengan Pak Itjen, ini terkait dengan audit PNPB, sejauhmana pelaksanaan audit ini. Kita tahu bahwa Kementerian Perhubungan ini kan selalu melampaui target pendapatannya bukan pajak Pendapatan Negara Bukan Pajak. Kita tahu bahwa tentu banyak hal yang menjadi lubang-lubang yang di sana tentu yang menjadi rawan untuk disalahgunakan oleh teman-teman di sana. Tentu kita ingin tahu sejauh mana teman-teman dari Itjen melakukan pengawasan yang paling tidak bahwa bisa menyelamatkan uang negara yang ada di sana lebih maksimal.

Kemudian yang kedua terkait dengan BPSDM. Ini saya melihat bahwa ada 25 sekolah yang di bawah naungan oleh BPSDM, *nah* ini yang berbeda-beda ya. Apakah di setiap sekolah ini memang hanya diterima di situ orang-orang yang ada di kabupaten itu atau di provinsi itu. Apakah bisa lintas misalnya anak-anak dari Sulawesi mau sekolah di BP Curug atau BP3 Curug ya untuk penerbangan, apakah memungkinkan atau seperti apa. Apakah harus hadir di sana di Curug untuk melakukan pendaftaran atau bisa *online* di seluruh Indonesia. Ini penting karena banyak pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat terhadap kami karena mereka tahu bahwa kami mitra dengan Kementerian Perhubungan. Mereka tanya, apakah bisa kita ikut mendaftar di daerah-daerah yang merupakan ada lembaga pendidikan yang merupakan minat dari masyarakat di Sulawesi misalnya.

Kemudian yang selanjutnya, ini kebijakan tentang lalu lintas dari BKT. Tentu kita tahu bahwa hari ini hampir semua di kota-kota besar ini terjadi kemacetan-kemacetan yang luar biasa. Bagaimana *sih* fungsi BKT di sini dalam hal mengantisipasi hal ini ya. Seperti di kota Makassar hari ini hampir sudah setiap hari mengalami kemacetan. Tentu ini kita harapkan bahwa fungsi BKT betul-betul bisa maksimal karena sudah banyak pengalaman daerah-daerah lain yang lebih dahulu mengalami kemacetan dan kesemrawutan arus lalu lintas.

Kemudian terkait dengan evaluasi tarif angkutan udara, sejauhmana peran dari teman-teman dari BKT dalam hal memberikan pertimbangan terkait dengan tarif pesawat udara ya. Kita tahu bahwa banyak ya lokasi-lokasi hari ini yang karena persaingannya tidak terlalu ketat hanya satu penerbangan atau hanya dua maskapai sehingga maskapai seenaknya untuk menentukan tarif dalam hal melayani seluruh penumpangnya.

Kemudian ke Pak Sekjen, tentu ini kita harapkan bahwa harmonisasi dari seluruh bidang di Kementerian Perhubungan bisa menjadi lebih baik di bawah koordinasi Pak Sekjen. Dengan anggaran yang ada, kita tentu tidak terlalu bisa melihat secara *detail* karena ini kebanyakan belanja habis. Jadi tentu yang kita harapkan bahwa bagaimana komunikasi dengan teman-teman dari Dapil melalui Pak Sekjen bisa terkomunikasi dengan baik. Apalagi tahun ini adalah tahun politik, tentu kita mengharapkan bahwa suara-suara baik dari Kementerian Perhubungan juga bisa meningkatkan elektoral kami di Dapil.

Barangkali itu yang sempat saya sampaikan.

Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Selanjutnya saya persilakan kepada Ibu Cen, kemudian nanti setelah itu Pak Willem, silakan Bu Cen.

F-P. GOLKAR (CEN SUI LAN):

Terima kasih, Pimpinan.

**Yang saya hormati Pimpinan dan teman-teman Komisi V,
Yang saya hormati Pak Sekjen, Pak Irjen, Pak Kepala BKT dan Kepala BPSDM,**

Saya langsung, Pak Sekjen. Pak Sekjen, saya ingin mengajukan penerangan. Kemarin sudah saya sampaikan ke Pak Sekjen juga perlu saya sampaikan seminggu yang lalu sudah mulai ada *survei* untuk PJO, tetapi hanya bisa di dua kota saja. Dapil saya itu ada 5 kabupaten dan 2 kota, masih ada sisa 5 kabupaten yang perlu penerangan karena krisis listrik di tempat kita dan kita pulau terluar 3T. Tolong Pak Sekjen bantu agar bisa diakomodir. Kalau bisa ya sisa anggaran, Pak Sekjen. Mengapa saya sampaikan? karena urgensinya sangat sangat *urgent*. Jadi tolong dibantu PJU ya, Pak Sekjen ya. Dan kepada Pak, dan Pak Sekjen juga banyak kali lah mangkrak-mangkrak di tempat saya itu pelabuhan-pelabuhan. Saya khawatir selesainya nanti masa Pak Menteri belum juga terbangun. Ada beberapa pokoknya banyak sekali di Kepri itu. Jadi mohon bagaimana solusinya. Dan kepada Pak Irjen, selamat Pak Arif Toha, Bapak sekarang sebagai Irjen dari Hubla dulu, selamat menempati jabatan baru.

Pak BKT, saya langsung ya, Pak Kepala ya. *Nah*, saya ingin menanyakan yang menindaklanjuti pertanyaan Pak Aras. Apakah ada analisa atau bagaimana kepada *stakeholder* penerbangan mengenai harga-harga tiket. Berkali-kali kita sampaikan juga banyak ketimpangan yang terjadi di beberapa rute termasuk lah di tempat saya Natuna, jadi harga tiket sangat mahal sekali. Juga saya ingin menyampaikan bukan hanya tiket, jadi perlu disampaikan kepada *stakeholder*, apakah ada analisisnya servis sekarang penerbangan makin lama makin tidak bagus. Apakah ada kajian-kajian atau ada bagaimana sistemnya saya *enggak* tahu tapi saya ingin menyampaikan banyak keluhan dan juga kita juga mengalami penerbangan semakin lama servis semakin tidak bagus, *delay* dan hal-hal lainnya mungkin bisa jadi masukan.

Itu aja, Pak Pimpinan.

Terima kasih semua.

KETUA RAPAT:

Iya, selanjutnya saya persilakan Pak Anwar Hafid, silakan Pak Anwar.

F-P. DEMOKRAT (Drs. H. ANWAR HAFID, M.Si.):

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat sore, salam sejahtera buat kita sekalian.

**Bapak Pimpinan dan sahabat Komisi V yang saya muliakan,
Pak Sekjen dan seluruh jajaran yang hadir pada kesempatan ini,**

Yang pertama, Pak Sekjen, saya tidak melihat paparan, saya tidak mengoreksi di situ Pak, saya akan kembali mengulangi seperti harapan saya dengan Sekjen di Kementerian PUPR tadi. Saya berharap Pak Sekjen, kita ingin sekali mendapatkan informasi sebetulnya, sudah sejauhmana pencapaian dari seluruh program Kementerian Perhubungan sampai dengan tahun ke-4 RPJMN kita ini. Karena bagaimanapun juga pengawasan kami sebetulnya berharap sampai dengan 2024 nanti seluruh rencana kita mulai dari 2019-2024 ini bisa tercapai. *Nah*, ini kami ini mendapatkan gambaran sudah berapa persen capaian kita selama 3 tahun kemudian kita masuk di tahun ke-5 ini, sehingga dengan demikian kita juga bisa puas di sini, Pak, sebagai mitra bahwa *alhamdulillah* kita selama ini berhasil melakukan pengawasan dengan mitra kita. Jadi perlu ada mungkin nanti, Pak, dibuatkan kami gambaran mengenai capaian-capaian kita selama kurun waktu 2019-2023. Itu yang pertama.

Kemudian yang kedua, Pak Irjen. Saya ingin juga melihat, Pak, mengingatkan Bapak. Mungkin salah satu sumber pendapatan negara yang sangat besar hari ini saya lihat itu adalah sumber pendapatan dari terminal-terminal khusus itu. Mohon, Pak, dilakukan pengawasan khusus ini karena saya tahu persis bahwa terminal khusus ini memiliki peran penting dalam upaya menjaga kebocoran-kebocoran. Termasuk kita dengar isu baru-baru ini soal adanya ekspor nikel ke luar negeri ya sampai berapa juta ton itu pasti tidak terlepas dari muaranya dari Tersus. *Nah*, ini mohon pengawasan, Pak, karena ini juga akan sangat membantu pemasukan keuangan negara.

Yang ketiga kepada Badan Kajian Transportasi. Yang pertama, Pak, soal arah kebijakan pembangunan transportasi ini saya lihat dari tadi 107 miliar ya, saya kira ini anggaran yang cukup besar. Yang pertama, mohon gambaran, Pak, ada 24 isu strategis atau dukungan direktif dari Pimpinan, kita tidak tahu apa semua itu, Pak, yang 24 itu mungkin bisa dijelaskan.

Kemudian yang kedua, saya ingin berharap sekali Bapak melakukan kajian soal tatanan kebandarudaraan kita. Contoh saya kasih contoh, Pak, di Sulawesi Tengah itu adalah salah satu Bandara Internasional yang juga menjadi sudah ditetapkan oleh pemerintah, tapi untuk ke daerah-daerah, Pak, jarang sekali penumpang itu dari Bandara Sis Al-Jufri. Itu misalnya semua yang ke Morowali yang ke Luwuk Banggai itu, semua lewat Makasar, Pak. Ini perlu dipikirkan bagaimana kira-kira tatanan kebandarudaraan itu sehingga mungkin semua kalau ada terkait perizinan atau apa ya, Pak Sekjen sehingga yang ada di sana ya kalau misalnya dari Jakarta itu langsung ke Palu sehingga penumpang-penumpang itu sekarang kalau dari Palu ke Morowali, Pak, Palu ke Luwuk itu dalam satu minggu paling satu kali penerbangan, itu kalau ada penumpang, tapi dari Makassar ke Morowali bisa tiga bisa empat sampai lima kali sehari, dari Makassar ke Luwuk juga begitu.

Nah, ini kalau menurut saya ada yang salah ini dari pengaturan ya, kan bandara hub apa namanya itu ya, kalau bisa dijadikan diperlakukan ini ketentuan ini sehingga tidak terlalu diberi kesempatan sebetulnya penumpang-penumpang untuk perizinan maskapai dari Makassar ke Morowali atau Makasar diberikan saya tidak tahu apa izin apa di dalamnya sehingga para penumpang yang dari Jakarta itu lewat ke Palu dulu, ke Palu baru Palu-Luwuk dan Palu-Morowali atau Palu-Buol dan Toli-toli sehingga ini bisa membuat Bandara Sis Al-Jufri itu bisa lebih ramai, bisa lebih lancar dan bisa melalui Provinsi Sulawesi Tengah itu yang saya lihat, Pak. Saya amati itu saya *ndak* tahu kira-kira di mana kira-kira solusinya itu, Pak. Karena dari Palu kosong ke bahkan seminggu sekali tapi dari Makasar bisa berlebihan sampai lima kali dan orang dari Jakarta itu rata-rata semua mengambil rute Makasar *ndak* ada yang mengambil rute Palu karena tidak ada jalur dari Palu ke Morowali. Kira-kira begitu, Pak, ini keluhan semata-mata.

Kemudian yang kedua, Pak, soal saya setuju sekali tadi soal *review* juga tentang mungkin peraturan soal tarif ini, Pak, saya ulangi lagi. Saya juga heran itu soal tarif, tarif dari Makassar ke Morowali itu bisa sampai 2 juta, Pak. Kalau dibilang tidak ramai, ramai, Pak, sampai 4 kali juga itu sehari tapi *kok* sampai 1.800.000 biasa muncak sampai 2 juta. Ini perlu dipikirkan ini, Pak, bagaimana solusinya sehingga mungkin dari kajian transportasi ini, Pak, bisa dikaji, karena ini menurut saya sebuah *problem*, Pak, ya.

Saya kira itu saja, Pak Ketua.

Terima kasih, mohon maaf Pak Sekjen dan seluruh jajaran.

*Wallahul musta'an
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

KETUA RAPAT:

Walaikumsalam.

Yang terakhir Pak Willem, silakan Pak Willem.

F-P. DEMOKRAT (WILLEM WANDIK):

Baik.

Terima kasih.

Pak Ketua dan juga rekan-rekan Anggota Komisi V, dan Pak Irjen, BPSDM, BKT dan Pak Irjen, serta Seluruh jajaran yang kami hormati,

Dari kami yang pertama terkait dengan pagu anggaran Sekjen untuk tahun anggaran 2024 sebesar 649 miliar. Artinya ada peningkatan dari tahun sebelumnya dan juga Irjen juga sama 107 miliar dari tahun sebelumnya. Semoga ini mempengaruhi kinerja dari Sekretariat Jenderal dan juga Inspektorat Jenderal.

Dan terkait dengan untuk Sekretariat Jenderal pertama terkait dengan adanya berita di media untuk kebijakan subsidi tarif Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau KCJB yang perlu ini kayaknya perlu dikaji kembali besarannya. Untuk tarif ini karena konsumennya lebih didominasi kalangan menengah ke atas, karena tidak adil kalau diterapkan subsidi. Minimal tarif KCJB ini di atas tarif tiket kelas eksekutif kereta api yang sudah ada dari Jakarta-Bandung atau sama.

Dan untuk BPSDM kalau Kementerian Perhubungan selama ini secara reguler dalam rangka peningkatan SDM, perhubungan melalui kegiatan Diklat Vokasi dan Diklat Teknis di lokasi yang sudah tertentu. Kalau ini terus dilakukan maka peningkatan SDM secara reguler yang ada mungkin bisa diperhatikan kembali, karena kalau seperti dilakukan terus nanti bisa terjadi ketimpangan antara daerah tertentu dengan daerah tertentu. Seperti katakanlah di wilayah timur di Papua, itu bisa terjadi ketinggalan, ibarat orang tempat kerja antara jalan kaki dengan naik kendaraan sampai ke tempat tujuan tentu dihadapkan pada kondisi yang berbeda dan ini mempengaruhi aktivitas produksi, oleh karena itu kiranya perlu diperhatikan.

Karena itu pada kesempatan ini, kami menyampaikan supaya dalam melaksanakan pembangunan SDM yang kompetitif dan unggul di wilayah DOB. Untuk kami di Papua hari ini ada 4 DOB baru agar bisa mampu membangun dengan baik kalau SDM-nya dipersiapkan sedini mungkin. Karena itu, kiranya BPSDM Perhubungan menyelenggarakan program non reguler untuk memenuhi kebutuhan SDM DOB provinsi baru yang pelaksanaannya langsung di ibu kota provinsi agar mendekati kondisi permasalahan daerah yang sebenarnya.

Dan juga terkait dengan adanya rencana dari sejumlah daerah DOB akan melakukan audiensi dengan kementerian/lembaga terkait di pusat sini. Oleh karena itu, kami juga menyampaikan kepada Pak Sekjen dan kepada Dirjen terkait bisa terlibat langsung dalam audiensi itu karena misi mereka adalah untuk meminta dukungan pemerintah pusat terlibat langsung dalam penyusunan dokumen perencanaan induk secara komperhensif supaya dalam pengembangan kawasan DOB baru maupun pembangunan kabupaten setempat itu bisa berlangsung secara kesinambungan dan berkelanjutan. Dan juga pada kesempatan itu, ada beberapa kabupaten akan datang untuk penyusunan dokumen induk pembangunan bandara. Oleh karenanya, minta Pak Sekjen dan juga Dirjen Udara bisa terlibat langsung.

Dan berikut kami juga menyuarakan sedikit senada apa yang telah disampaikan oleh rekan-rekan pendahulu saya tadi bahwa memang kami di Papua itu bukan baru kali ini kami menyuarakan keluhan terkait persoalan begitu tingginya tingkat kemahalan harga tiket pesawat. Namun sudah sejak lama hampir setiap tahun keluhan itu selalu ada karena akses utama di tanah Papua itu adalah transportasi udara, namun harga tiket selalu menjadi keluhan tersendiri bagi masyarakat tanah Papua.

Oleh karena itu, pernah dalam pertemuan dengan Pak Menteri pernah kami sampaikan untuk perlu kita lakukan audiensi dengan seluruh *stakeholder* yang ada, yang berkompeten dalam penentuan kebijakan terkait tarif tiket penerbangan dari dan tempat tujuan. Karena miris rasanya karena dari Jakarta, kita ke Eropa itu lebih murah daripada kita ke tanah Papua jauh lebih mahal dari belasan juta sampai puluhan juta. Jadi kadang kita uang kunjungan Dapil kadang *enggak* cukup sehingga kita nombok

sendiri itu, itu hanya dari Jakarta-Jayapura belum lagi kalau kita terbang ke wilayah lain. Misalnya dari Jayapura harus ke Merauke atau Wamena atau ke Timika itu lain lagi, dari situ harus terbang lagi ke kecamatan itu harus pakai pesawat lagi dan itu tidak ada rute yang rutin tapi harus kita carter kadang.

Tentunya ini perlu menjadi kajian tersendiri dari minta keterlibatan langsung dari Pak Sekjen dan juga dengan beberapa Dirjen terkait supaya ini bisa diminimalisir. Kenapa harus demikian? karena memang tanah Papua itu hingga hari ini di sana masyarakat tidak punya lapangan kerja. Hingga hari ini lapangan kerja hanya jadi seorang ASN, petani tapi tidak menjadi petani di sana walaupun tanah Papua dijuluki sebagai surga kecil yang jatuh di tanah Papua tapi kenyataannya tidak seperti itu. Tanah Papua orang mau jadi ASN, mau jadi pekerja swasta harus ke Jakarta, tapi tanah Papua walaupun seperti itu tapi kadang kita dihadapkan dengan *cost* dan inflasi yang begitu tinggi sehingga perlu ini menjadi perhatian supaya dengan penentuan tarif yang jelas begini, tentu ini akan mempengaruhi *cost* dan inflasi sehingga bisa terjangkau bagi masyarakat tanah Papua karena masyarakat di tanah Papua tidak punya lapangan kerja tetap, tidak punya pendapatan tetap. Karena itu tentunya bisa menjadi perhatian, karena saya baru bersuara ini karena saya sedikit kaget kalau teman-teman lainnya juga punya keluhan yang sama seperti itu. Saya kira kami pikir hanya tanah Papua saja yang ada keluhan seperti itu selama ini.

Itu saja yang bisa dapat kami sampaikan pada kesempatan ini, sekian.
Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baiklah.

Rekan-rekan Komisi V,

Ini Pak Sekjen ada enam penanya dari Anggota.

Saya persilakan kepada Pak Sekjen dan Bapak Irjen dan Kepala Badan untuk memberikan tanggapannya. Silakan yang pertama dari Pak Sekjen.

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI (Ir. NOVIE RIYANTO, MSEA):

Terima kasih, Pak Pimpinan, atas kesempatannya. *Bismillahirrohamnirrohim* saya mencoba untuk menjawab secara ringkas namun demikian nanti secara lengkap tertulis kami akan buat jawaban tertulisnya.

Yang pertama terkait dengan pertanyaan Ibu Sri Rahayu terkait dengan Pusdatin, kenapa Pusdatin anggarannya besar ya. Jadi memang kita tahu semua Pusdatin ini ke depan akan menjadi *central data*, Pak, semua perizinan sekarang semuanya adalah menggunakan *online*. Demikian juga nanti ke depan terhadap pendataan-pendataan termasuk di dalamnya juga monitor terhadap kemajuan pembangunan infrastruktur yang kita lakukan. Kemudian SDM yang ada di sekian ribu lokasi yang kita kelola, yang kita berikan pelayanan itu semuanya akan kita pusatkan di Pusdatin sehingga Pusdatin ini benar-benar menjadi *central* pengambilan

keputusan, *central* untuk *monitoring* pelayanan dan juga *central* untuk bisa mengetahui perizinan-perizinan yang saat ini memang sudah harus *online* semuanya. Jadi ini memang menjadi satu tujuan kita bersama, bersama-sama dengan kementerian/lembaga terkait lainnya. Yang terkait misalnya kita dengan Imigrasi, kita dengan Bea Cukai, semuanya ini akan *online*, Pak, ke depan, termasuk juga untuk perizinan-perizinan untuk berlayar dan lain sebagainya. Ini memang perlu dianggarkan lebih banyak dan perlu diisi oleh profesional-profesional yang membidangi hal tersebut.

Kemudian tadi juga dipertanyakan oleh Bu Sri dan Pak Sumail terkait dengan fungsi Atase Perhubungan, itu seperti apa. Kemudian contohnya yang paling gampang ya tadi kami sampaikan tadi juga Bu Sri Rahayu menyampaikan sendiri terkait dengan misalnya di Jeddah. Ini kan juga jelas Atase Perhubungan kita itu mewakili pemerintah dalam hal ini sektor transportasi untuk berkoordinasi lebih ketat. Contohnya yang di Jeddah misalnya untuk haji, untuk umroh ini Atase berperan sangat penting sekali di sini untuk mengatur slot penerbangan, untuk mengatur slot kedatangan penumpang, mengatur *flow* dari jema'ah-jema'ah kita baik haji maupun umroh.

Jadi ini Atase ini memang sangat penting kita tempatkan di berbagai negara dan kalau kita lihat memang kita Indonesia ini kan banyak sekali melakukan perjanjian, baik itu dengan bilateral, multilateral, maupun dengan organisasi-organisasi internasional. Seperti IMO untuk pelayaran, kemudian untuk penerbangan juga ada ICAO, dan juga pada saat kita nanti membuat rute penerbangan misalnya katakanlah antara Jakarta dengan London dibuka rute yang baru, itu harus ada bilateral-bilateral *agreement* yang tentu saja harus dikawal ketat oleh Atase kita. Belum lagi yang di Singapura, Singapura itu kita banyak sekali pelayaran yang berhubungan antara Indonesia dengan Singapura. Oleh karena itu, Atase Perhubungan khususnya yang bidang pelayaran ini sangat penting, banyak sekali hal-hal yang harus diselesaikan oleh si Atase untuk bisa menyelesaikan menjembatani perwakilan atau sebagai perwakilan pemerintah khususnya Kementerian Perhubungan dengan Kementerian Transportasi yang ada di Singapura. Jadi itu beberapa contoh yang bisa kami sampaikan, nanti kami akan *share* secara *detail*.

Selanjutnya, tadi siap Pak Aras ya untuk harmonisasi ke depan kami akan laksanakan, Pak, terus untuk perbaikan, sehingga inspirasi-inspirasi dari Bapak-Bapak di Komisi V akan bisa tersalurkan secara baik dan pengawasannya juga akan kami dukung sepenuhnya.

Untuk Bu Cen Sui Lan terkait dengan apa PJU Bu ya, kami koordinasi ketat, Bu, nanti dengan teman-teman di Dirjen Darat menjadi perhatian kami untuk di kepulauan-kepulauan Ibu yang memang membutuhkan penerangan ini, kami akan memberikan prioritas, Bu, dan kami segera laporkan nanti koordinasi kami dengan Pak Dirjen Darat.

Selanjutnya untuk Pak Anwar terkait dengan capaian yang ada, Pak. Kami nanti sampaikan Pak melalui Karo Perencanaan, baik itu PSN (*Project* Strategis Nasional), kemudian direktif dari Presiden, termasuk direksi dari Bapak-Bapak ini semuanya juga akan bisa kita laporkan, Pak, secara detail capaian kita sampai dengan hari ini, Pak. Jadi kita memang hari-hari memonitor semua kegiatan baik itu fisik maupun non fisik yang terkait dengan transportasi bisa kita laporkan. Demikian

juga yang ada di Jakarta LRT sampai di mana, kelamahannya dimana bisa kita laporkan, termasuk juga MRT yang saat ini sedang *in* ya, demikian juga dengan KCJB ini sedang semuanya bisa kita laporkan.

Selanjutnya untuk tadi pertanyaan untuk tatanan kebandarudaraan nanti dari BKT, Pak, ya dan mungkin pada saat RDP dengan Dirjen Udara, Bapak bisa bertanya lebih detail, kenapa begini, kenapa begitu, tatanan kebandarudaraan hubungannya apa. Ini sebenarnya ini betul *sih*, Pak, berhubungan dengan tatanan kebandarudaraan, namun demikian untuk *planning* suatu rute penerbangan kita bisa terlepas kepada *airlines*, karena *airlines* mempunyai trik bisnis tersendiri dan kita tidak bisa mengatur mereka 100%. Misalnya, kamu kan terbangnya dari sini ke sini *aja*, *enggak* bisa seperti itu, Pak, karena mereka sudah punya hitungan bisnis, kita pun mempunyai. Pada saat kita mengeluarkan izin rute tentu saja kita ada hitung-hitungannya juga. Namun demikian, tidak sepenuhnya keputusan itu oleh pemerintah kecuali rute itu adalah rute apa namanya yang dibiayai oleh pemerintah, melalui subsidi ataupun perintis, *nah* itu bisa kita lakukan.

Selanjutnya untuk Pak Willem tadi ya, harga tiket ini mahal nanti dari teman-teman, Pak, ya dari yang kaitannya dengan udara, Bapak bisa dalam di situ. Setahu kami berdasarkan Raker kemarin nanti akan hadir bersama-sama *stakeholder*. Jadi bisa langsung berkoordinasi ataupun bertanya jawab dengan *airlines*, juga teman-teman di-regulator melalui Direktur Angkutan Udara.

Demikian, Bapak Pimpinan, kami kembalikan. Terima kasih. Mudah-mudahan yang kami sampaikan bisa menjawab beberapa pertanyaan dan hal-hal yang detail kami akan sampaikan secara tertulis. Terima kasih, kami kembalikan.

KETUA RAPAT:

Apakah ada tambahan dari Pak Irjen atau Bapak Kepala Badan, ada tambahan atau tidak? cukup ya? cukup ya? Kalau begitu kita masuk kepada draf kesimpulan.

F-P. DEMOKRAT (WILLEM WANDIK):

Pak Ketua tadi saya ada sedikit.

KETUA RAPAT:

Iya, Pak Willem.

F-P. DEMOKRAT (WILLEM WANDIK):

Ini BPSDM, tentunya, Pak, rekan-rekan dari mitra sebagaimana kita ketahui bersama bahwa transportasi utama di tanah Papua itu transportasi udara. Dan di Papua itu ada Politeknik Penerbangan itu ada dua, satu punya negeri satu swasta, swastanya itu posisi ada Timika, kami melihat jauh. Ini masih luput dari perhatian pemerintah, karena itu kalau ada waktu luang begitu *monggo* bisa ditinjau ke sana. Karena banyak yang alumni dari situ ke luar, mungkin bisa berikan perhatian khusus untuk Sekolah Akademi Penerbangan yang ada di Timika, saya lupa apa namanya

tapi yang jelas itu Akademi Penerbangan. Tetapi kalau yang negeri ada di Jayapura itu sudah cukup lama yang sering kami hadir di sana. Semoga ini menjadi perhatian.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Iya, saya kira cukup ya Bapak-Ibu ya.

Kita masuk kepada draf kesimpulan, silakan tolong ditampilkan draf kesimpulan. Tapi sebelum ke kesimpulan, Pak Sekjen, tadi yang disampaikan Ibu Cen itu mengenai apa sarana dan prasarana di Kepri, saya kira itu tolong diperhatikan juga, tetapi bukan hanya Kepri saja, Pak Sekjen, seluruh Indonesia dan terutama Sumatera Barat, Pak Sekjen. Sumatera Barat itu masih banyak yang perlu harus diperhatikan dari Kementerian Perhubungan, kebetulan itu saya dari Sumatera Barat. Iya kita masuk ke draf kesimpulan.

DRAF KESIMPULAN RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI V DPR RI DENGAN SEKRETARIS JENDERAL, INSPEKTUR JENDERAL, KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN DAN KEPALA BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN.

1. Komisi V DPR RI memahami penjelasan Sekjen, Irjen, Kepala BPSDM-P dan Kepala Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan mengenai rencana kerja dan anggaran masing-masing unit organisasi Eselon I, dalam RAPBN Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:
 1. Sekretaris Jenderal, Pagu Kebutuhan Tahun Anggaran 2024 sebesar 1.243.503.124.000, Nota Keuangan RAPBN Tahun 2024 sebesar 645.574.148.000 ada selisih sebesar 597.928.976.000, ini selisihnya tinggi sekali ini, Pak Sekjen, dari kebutuhan dan Nota Keuangan RAPBN,
 2. Inspektorat Jenderal, Pagu Kebutuhan, sebesar Pagu Kebutuhan Tahun Anggaran 2024 sebesar 141.193.093.000, Nota Keuangan RAPBN Tahun 2024 sebesar 111.180.529.000, ada selisih sebesar 30.084.564.000,
 3. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan, Pagu Kebutuhan Tahun Anggaran 2024 sebesar 8.691.680.897.000, Nota Keuangan RAPBN Tahun 2024 sebesar 3.693.390.420.000, ada selisih sebesar 4.998.290.477.000, selisihnya juga cukup tinggi di sini, kemudian
 4. Badan Kebijakan Transportasi Pagu Kebutuhan Tahun Anggaran 2024 sebesar 589.163.821.000, Nota Keuangan RAPBN Tahun Anggaran 2024 sebesar 192.948.758.000, ada selisih sebesar 396.215.063.000. Kalau kita melihat selisihnya lumayan tinggi dari semua unit Eselon I.
2. Komisi V DPR RI bersama Sekjen, Irjen, BPSDM-P, dan Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan sepakat bahwa program dan kegiatan masing-masing unit organisasi Eselon I pada Tahun Anggaran 2024 disesuaikan dengan saran, pendapat dan usulan Komisi V DPR RI dalam rangkaian rapat pembahasan RAPBN Tahun 2024.
3. Komisi V DPR RI meminta Irjen Kementerian Perhubungan untuk meningkatkan pengawasan terhadap operasional bandara dan pelabuhan yang

belum berfungsi optimal, serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

4. Komisi V DPR RI meminta Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan untuk melakukan kajian terhadap tarif angkutan udara serta melaporkannya kepada Komisi V DPR RI.

Anggota Komisi V apakah ada masukan tambahan atau cukup setuju? Pemerintah? cukup ya kalau *gitu* saya ketok ya.

(RAPAT: SETUJU)

**Bapak-Ibu,
Hadirin-hadirat yang saya hormati,**

Dengan telah disepakatinya beberapa kesimpulan dan keputusan tersebut maka rangkaian acara pada RDP pada hari ini telah kita selesaikan.

Kami mohon maaf apabila ada kata-kata tindakan yang kurang berkenan selama berlangsungnya rapat.

Sebelum kita akhiri saya persilakan kepada pemerintah dalam hal ini diwakili Pak Sekjen untuk memberikan *closing statement*. Silakan, Pak.

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI (Ir. NOVIE RIYANTO, MSEA):

Terima kasih, Pimpinan.

Yang terhormat Pimpinan Komisi V beserta Anggota Komisi V DPR RI,

Pertama-tama, kami mengucapkan terima kasih atas masukan dan pandangan yang telah disampaikan, yang akan menjadi landasan yang kuat dalam penyusunan rencana kerja dan alokasi anggaran yang lebih baik. Kolaborasi dan dukungan dari semua pihak sangat kami hargai dalam upaya menuju pencapaian tujuan bersama. Semoga langkah-langkah yang kita ambil pada rapat hari ini akan membawa hasil yang maksimal dan berkelanjutan bagi Kementerian Perhubungan dan masyarakat Indonesia.

Sekian dan terima kasih.

*Wabillahitaufiq walhidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

KETUA RAPAT:

Dengan demikian maka rapat dengar pendapat pada hari ini bisa kita tutup. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih.

Wabillahitaufiq walhidayah.

Wassalamualaikum warahamatullahi wabarakatuh.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 16.10 WIB)

JAKARTA, 31 Agustus 2023

a.n. KETUA RAPAT
SEKRETARIS RAPAT,

TTD

NUNIK PRIHATIN BUDIASTUTI, S.H.
NIP. 196912021998032002